

**SKRIPSI**

**TES WAWASAN KEBANGSAAN DALAM PROSES ASESMEN PEGAWAI  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2021 DITINJAU DARI  
ASAS KEMANFAATAN DALAM HUKUM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana  
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

**AYU LISMI NURRUL AINI**

**1810112150**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)**




**Pembimbing :**

Arfiani, S.H., M.H.

Beni Kharisma Arasuli, S.HI., LL.M

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Ayu Lismi Nurrul Aini	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 06 Juni 2000 b) Nama Orang Tua : Zairul Arif c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Tata Negara e) No BP : 1810112150	f) Tanggal Lulus : 11 Juli 2023 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) Lama Studi : 5 Tahun i) IPK : 3,51 j) Alamat : Jln, tunggang kandang padati no 94, Kuranji	

**TES WAWASAN KEBANGSAAN DALAM PROSES ASESMEN PEGAWAI KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2021 DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN  
DALAM HUKUM**

( Ayu Lismi Nurrul Aini, 1810112150, fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Tata Negara (PK V), 2023, Pembimbing : Arfiani S.H., M.H. dan Beni Kharisma Arrasuli S.HI., L.L.M.)

**ABSTRAK**


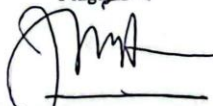

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan konsekuensi KPK ditetapkan sebagai lembaga kekuasaan eksekutif, yang artinya secara kepegawaian KPK pun ikut beralih status menjadi ASN. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa proses perekrutan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) harus memenuhi persyaratan dan juga melalui beberapa tahapan. Dalam proses asesmen alih status ini, KPK mengikuti tahapan secara prosedural yang tertuang dalam UU ASN. Selama prosesnya, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah tahapan yang paling menyita perhatian publik, pasalnya hasil TWK ini dijadikan dasar dalam mengagalkan 57 pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dalam TWK. Berdasarkan uraian diatas, maka yang ingin ditelaah adalah: Pertama, bagaimana proses asesmen alih status pegawai kpk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua, bagaimana implikasi dari proses tersebut ditinjau dari asas kemanfaatan dalam hukum. Data yang didapatkan yakni data sekunder dengan mengolah data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa proses terkait TWK KPK dimuat dalam Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Mengenai Pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi ASN bahwa TWK dibagi menjadi tiga tahapan yaitu: tahapan persiapan, tes indeks moderasi (IMB- 68) dan integritas dan tahapan wawancara. Pelaksanaan rangkaian asesmen diseleraskan dengan pengaturan yang ada. Jika ditinjau dari asas kemanfaatan maka dalam pelaksanaan proses asesmen alih status dengan menggunakan TWK dapat memenuhi indikator tersebut dengan beberapa catatan atas pelaksanaan TWK KPK tahun 2021.

**Kata Kunci : KPK, Tes Wawasan Kebangsaan, ASN**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 11 Juli 2023.

Abstrak telah disetujui oleh penguji,

Penguji,

Tanda Tangan 	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	Yunita Sofyan, S.H., M.H.	Delfina Gusman, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Tata Negara : Arfiani, S.H., M.H.



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

Alumni Fakultas :	Nama:	Tanda Tangan:
Alumni Universitas :	Nama:	Tanda Tangan: